

Resistensi Sastra di Bawah Orde Baru

Bagaimana sastra berperan sebagai bentuk resistansi intelektual di bawah represi dan tekanan Orde Baru?

30 Agustus 2025 | 12.00 WIB

 Dengarkan Berita



Iklan

Aa



Bagikan



Ringkasan Berita

- Sastra hadir sebagai arsip emosional, medium yang dengan jujur merekam.
- Pada masa Orde Baru, sastrawan merespons dinamika kekuasaan dan pertarungan ideologi dengan berbagai strategi.
- Sastra di era Orde Baru adalah memori penderitaan yang tak boleh dilupakan.

SEJARAH, seperti kata pepatah, sering kali ditulis oleh mereka yang memenangi pertarungan. Ia menjadi narasi tunggal yang diresmikan, sementara ribuan kisah lain dibuang ke dalam peti mati keheningan. Selama 32 tahun, rezim **Orde Baru** berupaya keras membangun ingatan kolektif tentang Tragedi 1965 dengan stigma "pengkhianatan" dan "bahaya laten komunisme".

Di tengah rekayasa memori yang masif ini, sastra hadir sebagai arsip emosional, medium yang dengan jujur merekam "bagaimana rasanya" hidup dalam ketakutan, alih-alih sekadar mencatat "apa yang terjadi".

Iklan

Pentingnya **sastra** dalam melengkapi sejarah resmi tidak bisa diabaikan. Sementara laporan sejarah formal terkungkung oleh fakta dan data, fiksi memiliki kelenturan untuk menyelami psikologi, trauma, serta penderitaan personal yang tidak terucap. Inilah yang dilakukan oleh para sastrawan Indonesia di bawah rezim otoriter. Alih-alih bungkam, mereka merespons dinamika kekuasaan dan pertarungan ideologi dengan berbagai strategi, mencerminkan perlawanan intelektual yang berbeda di setiap era.

BACA JUGA

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Orde Baru dengan cerdas membangun "politik ingatan" yang monolitik, di mana setiap narasi yang berbeda dari versi resmi dianggap subversif. Semua narasi harus seragam, dan siapa pun yang berani mempertanyakan akan dicap sebagai pemberontak. Namun, di bawah permukaan, di ruang-ruang sunyi yang luput dari pengawasan ketat, beberapa **sastrawan** dengan

Iklan

pemberontak. Namun, di bawah permukaan, di ruang-ruang sunyi yang luput dari pengawasan ketat, beberapa **sastrawan** dengan berani merobohkan tembok kebisuan itu. Mereka memilih medium fiksi sebagai senjata perlawanan, bukan sekadar untuk bercerita, melainkan untuk melawan.

Dengan strategi yang halus dan alegoris, mereka mendokumentasikan penderitaan, menantang hegemoni kekuasaan, dan menjadi penjaga memori yang tak resmi. Perlawanan ini, seperti sebuah pertempuran yang tak terlihat, dapat kita telusuri dalam tiga fase berbeda yang merefleksikan dinamika kekuasaan Orde Baru.

BACA JUGA

Karya dan Kontroversi Orhan Pamuk Sastrawan Turki



Iklan

Fase 1 Hegemoni Minimum (1966-1970)

Periode awal setelah Tragedi 1965 adalah masa transisi yang penuh gejolak. Narasi **militer** tentang kekejaman PKI di Lubang Buaya disebarluaskan secara masif melalui media yang dikendalikan. Namun cengkeraman kekuasaan belum sepenuhnya kokoh. Para sastrawan menanggapi kebrutalan ini dengan protes yang lugas dan berani.

Cerpen "Perempuan dan Anak-anaknya" (1966) karya **Gerson Poyk** menjadi salah satu saksi penting. Poyk menggambarkan amuk massa yang dipicu oleh berita dari Lubang Buaya sebagai "lumpur lahar" yang memuntahkan ribuan kematian. Meski demikian, narator dalam **cerpen** ini memilih menyelamatkan anak-anak dari keluarga komunis, sebuah tindakan yang berani melawan arus. Pesan humanis Poyk jelas: kebencian pada ideologi tidak boleh menumpas kemanusiaan, terutama kepada mereka yang tak bersalah.

Perlawanan lebih tajam datang dari **Ki Panjikusmin**. Dalam cerpen "Domba Kain" (1968), ia melontarkan kritik keras kepada aparat militer dan sipil yang membiarkan pembantaian massal. Karakter utamanya, seorang pahlawan cacat, menembak mati seorang Mayor Dandim dan bupati yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan keluarganya.

Karakter ini, yang akhirnya gila, menjadi alegori penderitaan yang tak terperikan. Sementara dalam "Bintang Maut" (1967), Ki Panjikusmin menyimbolkan G30S sebagai "dewa kematian" yang membangkitkan nafsu membunuh, sebuah kritik terhadap brutalitas yang tak terhindarkan dan irasional. Karya-karya ini menjadi bukti bahwa, pada awal **Orde Baru**, hegemoni belum sepenuhnya tertanam dan ruang oposisi, meskipun sempit, masih ada.

Fase 2 Hegemoni Total (1971-1980)

Setelah satu dekade, narasi **Orde Baru** telah mengakar kuat. Rezim ini menginstitutionalisasikan ideologi antikomunis melalui

Iklan

Fase 2 Hegemoni Total (1971-1980)

Setelah satu dekade, narasi **Orde Baru** telah mengakar kuat. Rezim ini menginstitutionalisasikan ideologi antikomunis melalui berbagai medium resmi. Monumen Pancasila Sakti (1973) dan **film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI** (1984) menjadi simbol otentisitas kebenaran. Buku teks *Sejarah Nasional Indonesia* (1975) dan penataran P4 (1978) menjadi instrumen efektif untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. Dalam suasana ini, sastra mengalami "isolasi", sebuah kondisi di mana penulis cenderung menyensor diri dan karyanya.

Novel *Mencoba Tidak Menyerah* (1979) karya Yudhistira A.N.M. Massardi menjadi contoh reproduksi narasi negara yang paling gamblang. Ia mengadopsi secara utuh cerita-cerita propaganda Orde Baru, termasuk mutilasi kejam di Lubang Buaya oleh Gerwani dan tarian telanjang mereka. Novel ini menyimpulkan bahwa hukuman berat bagi komunis adalah wajar, bahkan mengutip slogan balas dendam "Enam Juta Nyawa PKI Harus Membayar

Pengeksplorasian trauma secara halus ditemukan dalam novel *Kubah* (1980) karya **Ahmad Tohari**. Melalui karakter Karman, seorang mantan tapol, Tohari menggambarkan penderitaan akibat stigma sosial. Namun, pada saat yang sama, ia secara ironis merepresentasikan Pulau Buru sebagai tempat rehabilitasi yang berhasil.

Narasi ini, dengan segala kehalusannya, sejalan dengan propaganda Orde Baru yang mengklaim sukses "menginsafkan" para komunis. Ironi ini menunjukkan strategi penulis untuk bertahan di tengah represi, di mana kritik terbuka tak lagi dimungkinkan.



Iklan

Fase 3 Hegemoni Merosot (1981-1998)

Memasuki dekade 1980-an, Orde Baru, meskipun terus melakukan tindakan represif (seperti penembakan misterius dan pembredelan pers), mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. **Sastra**, yang sempat terbungkam, bangkit kembali dengan perlawanan yang lebih elegan dan humanis.

Trilogi **Ronggeng Dukuh Paruk** karya Ahmad Tohari menjadi mahakarya perlawanan pada era ini. Melalui tokoh Rasmus, seorang tentara, Tohari menggambarkan dilema moral yang tajam. Rasmus idealis, menganggap dirinya Gatotkaca yang seharusnya berani melawan musuh dari luar, bukan membantai rakyat sebangsa.

Puncak perlawanan Rasmus adalah ketika ia melihat kekasihnya, Srintil, yang dituduh terlibat PKI, menjadi gila akibat trauma. Ia memilih untuk melepaskan status militernya yang diagungkan dan menikahi Srintil, sebuah tindakan yang berani menentang arus dan norma sosial.

Y.B. Mangunwijaya dalam novel *Durga Umayi* (1991) mengajukan perlawanan humanis yang kuat. Karakter utamanya, Iin, seorang mantan aktivis Lekra, memilih untuk tetap dipenjara dan menghadapi hukuman daripada bekerja sama dengan rezim untuk membangun proyek eksklusif yang merugikan rakyat. **Novel** ini mengajarkan bahwa kebebasan memilih, integritas, dan moralitas adalah nilai yang lebih tinggi dari kekuasaan dan kekayaan yang ditawarkan oleh rezim.

Terakhir, Nh. Dini dalam *Jalan Bandungan* (1989) mengangkat isu stigma dan diskriminasi. Sebagai seorang istri tapol, Muryati mengalami isolasi dan cibiran. Namun ia tidak menyerah. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, ia berjuang untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan meraih kembali martabatnya sebagai individu. Narasi ini menunjukkan perlawanan perempuan terhadap narasi patriarki dan stigma yang dilekatkan oleh negara.

Penjaga Ingatan dan Jembatan Rekonsiliasi

Cerita pada era Orde Baru adalah memori dan identitas yang telah

Penjaga Ingatan dan Jembatan Rekonsiliasi

Sastra pada era Orde Baru adalah memori penderitaan yang tak boleh dilupakan. Ia menunjukkan betapa kejamnya sebuah ideologi kebencian yang ditanamkan secara sistematis dan meluas. Fiksi membongkar asumsi-asumsi yang ditanamkan rezim—misalnya bahwa semua yang berhubungan dengan **PKI** adalah ateis, jahat, dan pantas dihukum.

Sebaliknya, karya-karya sastra ini menghadirkan tokoh-tokoh yang penuh empati, yang berjuang membela kemanusiaan, bahkan saat nyawa mereka terancam. Sastra menjadi bukti bahwa, di balik narasi resmi yang monolitik, terdapat keragaman sikap, keberanian, dan kesadaran akan keadilan yang terus hidup.

Tentu, setelah **Orde Baru** tumbang, banyak karya sastra tentang Tragedi 1965 bermunculan dengan narasi yang lebih terbuka. Namun perlu dipahami bahwa konteks kepengarangan pada era tersebut dan era Reformasi sangatlah berbeda. Pada masa Orde

Namun perlu dipahami bahwa konteks kepengarangan pada era tersebut dan era Reformasi sangatlah berbeda. Pada masa Orde Baru, sastrawan menulis di bawah ancaman nyata dari hegemoni dan represi, dari pembredelan media, pencabutan izin terbit, hingga risiko penahanan.

Kondisi inilah yang melahirkan strategi penulisan yang khas dan penuh "heroisme" di mana penulis harus menyampaikan pesan dengan cara yang cerdas, alegoris, dan penuh simbolisme agar lolos dari jerat sensor. Tulisan ini sengaja dibatasi pada periode Orde Baru untuk menghargai serta memahami secara mendalam strategi perlawanan dan keberanian yang unik itu, yang merupakan pelajaran berharga tentang bagaimana fiksi dapat menjadi senjata ampuh untuk melawan kekuasaan.

Membaca **karya-karya** ini adalah sebuah tindakan politik. Ini adalah cara kita berempati, memahami luka-luka yang belum sembuh, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Sastra tidak hanya mengingatkan kita tentang kekelaman sejarah, tapi juga memberikan landasan untuk rekonsiliasi yang jujur.

Rekonsiliasi tidak akan pernah berhasil jika hanya didasarkan pada narasi yang dipaksakan. Ia harus dimulai dari pengakuan atas penderitaan, dari kesediaan untuk mendengar suara-suara yang dibisukan. Sastra menawarkan jembatan menuju pengakuan itu, sebuah pengingat abadi bahwa kebenaran tidak pernah menjadi monopoli kekuasaan dan bahwa kemanusiaan harus selalu berada di atas segalanya. ●

sastrawan

orde-baru

sastra



Yoseph Yapi Taum

Seorang penyair dan Dekan Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta